

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi sektor publik merupakan salah satu organisasi yang penting bagi perekonomian Indonesia yang berorientasi pada keperluan masyarakat. Organisasi sektor publik berkaitan erat dengan pemerintahan dan badan usaha yang dimana mayoritas kepemilikannya berada di tangan pemerintah dengan tujuan untuk mendapatkan nirlaba. Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat di berbagai aspek kehidupan seperti di bidang pendidikan, kesehatan, keamanan perekonomian dan beberapa aspek lainnya. Organisasi sektor publik dalam penerapannya terdapat fenomena yang menguatkan akuntabilitas terhadap kinerja organisasi-organisasi publik, baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah pusat dan daerah lebih cenderung berfokus pada pengeluaran nasional, dan sektor publik telah menjadi 'kran' perekonomian agar dapat menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih efektif pada sektor lain (Hale *et al*, 2024).

Pemerintah daerah dituntut harus dapat mengembangkan potensi sumber yang dimiliki pada setiap daerah seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya keuangan yang baik. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik (*good governance*) adalah pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan beberapa pihak yang terkait. Pihak-pihak yang terkait ini memiliki kepentingan dalam mengakses informasi mengenai hasil yang telah dicapai dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (Putra dan Varina, 2021). Laporan keuangan pemerintah daerah akan berguna dalam pengambilan keputusan bagi para pengguna laporan keuangan, sehingga informasi yang dibutuhkan oleh para pengguna telah sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemerintahan daerah, dengan diterapkannya kebijakan daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 akan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat bersama melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi

masyarakat, serta meningkatnya daya saing daerah dengan mengamati prinsip demokrasi, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Departemen Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, meminimalkan penyimpangan, serta memastikan bahwa dana daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan efisien, transparan dan akuntabel. Siklus keuangan daerah mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, dan akuntansi dalam pertanggungjawaban laporan keuangan daerah.

Laporan pertanggungjawaban merupakan laporan keuangan yang berkualitas, laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi ciri kualitas pada laporan keuangan sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu relevan, andal, bisa dibandingkan dan bisa dipahami. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip akuntansi yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam pengambilan keputusan pelaporan keuangan pemerintah yang berkualitas (Putra *et al*, 2024).

Menurut Laporan Keuangan (Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2010). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memberikan penilaian berupa opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada setiap tahunnya. Adapun penilaian yang akan diberikan oleh pemeriksa laporan keuangan adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Kualitas laporan keuangan pemerintah semakin berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi informasi. Perkembangan ini berkaitan dengan sistem akuntansi pemerintahan yang menghasilkan laporan keuangan untuk disampaikan kepada pihak yang membutuhkan yaitu pihak internal dan eksternal. Tuntutan publik

mengharuskan organisasi sektor publik dapat meningkatkan kualitas profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh akuntabilitas, jika kualitas laporan keuangan dinilai baik maka akan memberikan dampak terhadap akuntabilitas dan pertanggungjawaban laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintah akan membuat fasilitas dengan memberikan alat agar laporan keuangan lebih transparan dan akuntabilitas. Laporan keuangan yang berkualitas dapat disusun melalui implementasi standar akuntansi pemerintahan dan informasi yang digunakan dapat disajikan dengan lebih bermakna (Nirmalasari *et al*, 2024).

Penyajian laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya membutuhkan implementasi standar akuntansi pemerintahan (*implementation of government accounting standard*), tetapi juga memerlukan adanya kemampuan dari sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang keuangan dan pengalaman kerja yang kompetitif juga sangat dibutuhkan. Sumber daya manusia harus berkompeten dalam membuat laporan keuangan berstandar akuntansi pemerintah agar laporan keuangan tersebut memiliki kualitas yang baik. Namun, pada fakta nya dalam penetapan manajemen sumber daya manusia terutama pada pemerintahan daerah masih tidak sesuai dengan kebutuhan baik secara kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia tersebut (Ayu dan Kusumawati, 2020).

Pengelola sumber daya manusia memegang peranan penting dalam mencapai keunggulan bersaing di suatu organisasi. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi memiliki korelasi positif dengan pencapaian nilai tambah dan tingkat kualitas keputusan yang diambil oleh organisasi (Rosyidah, 2023). Kapasitas sumber daya manusia yang harus tersedia dipengaruhi oleh dua hal penting yaitu kualitas dan kuantitas. Sumber daya manusia yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya serta memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan (Dewi *et al*, 2024).

Penerapan standar akuntansi pemerintahan pada suatu organisasi akan menimbulkan permasalahan yang tidak dapat diprediksi walaupun sudah direncanakan dengan baik sebelum melakukan penelitian. Kebutuhan karyawan terlebih dahulu harus menentukan yang tepat baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dimiliki. Seorang karyawan yang berpengalaman, akan memudahkan suatu organisasi untuk melakukan aktivitas dan fungsinya sesuai dengan wewenang. Faktornya kemampuan seseorang tidak hanya cukup dilihat dari segi pendidikan dan pelatihannya, namun bisa juga dilihat dari segi pengalaman kerja dari seseorang tersebut selama bekerja pada organisasi atau lembaga tertentu (Ramadhan dan Nurabiah, 2024).

Sekarang ini laporan keuangan pemerintah masih terdapat banyak penyimpangan dan juga belum menyajikan data laporan keuangan yang memadai menurut peraturan pemerintah yang tercantum. Hal ini terjadi karena banyaknya tuntutan masyarakat kepada penyelenggaraan pemerintah untuk menerapkan akuntabilitas publik mewajibkan pemerintah memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan keuangan pemerintah supaya informasi yang dihasilkan berkualitas (Sukma *et al.*, 2023). Berdasarkan pada standar akuntansi pemerintah dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 tentang informasi pelaporan keuangan yang andal dan laporan keuangan tersebut bisa dipakai sebagai pemberian keputusan dalam mengalokasikan dana. Pelaporan keuangan dapat dikatakan andal apabila dalam penyajiannya terdapat fakta-fakta secara benar dan relevan serta dapat diverifikasi proses kebenaran penyampaian laporan keuangan. Apabila dalam penyajian laporan keuangan tidak bisa dipercaya maka pengguna informasi laporan keuangan tidak bisa mempercayai informasi yang telah disajikan.

BPK telah melakukan pemeriksaan sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2023

Kasus		Jumlah Kasus	Persentase
A.	Kelemahan sistem pengendalian internal	1.803	20,33%

Kasus		Jumlah Kasus	Persentase
B.	Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	3.757	42,36%
	a. Penyimpangan administrasi	883	23,50%
	b. Permasalahan ketidakpatuhan	2.874	76,50%
C.	Ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan	3.309	37,31%
	a. Ketidakhematan	195	5,89%
	b. Ketidakefisienan	2	0,06%
	c. Ketidakefektifan	3.112	94,05%

(Sumber: IHPS II BPK Jambi Tahun 2023)

Hasil pemeriksaan oleh BPK Semester II Tahun 2023 menemukan 651 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 1 LHP Keuangan, 288 LHP Kinerja, dan 362 LHP Dengan Tujuan Tertentu. BPK mengungkap 6.197 temuan yang memuat 8.869 permasalahan sebesar Rp 7,33 triliun. Hal itu meliputi 1.803 (20,33%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 3.757 (42,36%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp 6,46 triliun, serta 3.309 (37,31%) permasalahan ketidakhematan dan ketidakefektifan sebesar Rp 873,77 triliun. Dari permasalahan ketidakpatuhan sebanyak 2.874 (76,50%) dan penyimpangan administrasi sebesar 883 (23,50%) sebesar Rp. 6,46 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 1.967 (68,44%) permasalahan sebesar Rp 1,69 triliun, potensi kerugian sebanyak 477 (16,60%) permasalahan sebesar Rp 1,76 triliun, dan kekurangan penerimaan sebanyak 430 (14,96%) permasalahan sebesar Rp 3,01 triliun. Atas permasalahan tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan oleh entitas pada saat pemeriksaan sebesar Rp. 527,49 triliun. Terdapat permasalahan ketidakhematan sebesar Rp 728,10

miliar, terdapat 195 (5,89%), permasalahan ketidakefisienan sebesar Rp 333,12 juta dan 2 (0,06%) permasalahan ketidakefektifan sebesar Rp 145,33 miliar terdapat 3.112 (94,05%). Ketidakpatuhan terhadap temuan BPK menunjukkan kelemahan pengelolaan keuangan daerah yang bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, ekonomis dan sesuai peraturan perundang-undangan. (jambi.bpk.go.id).

Kota Jambi sendiri sejak tahun 2019-2023 memperoleh opini WTP Wajar Tanpa Pengecualian. Hasil pemeriksaan diatas 83 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2023 mengungkapkan opini WTP atas 79 LKKL dan 1 LKBUN, serta opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 4 LKKL. Hasil pemeriksaan tidak termasuk LK BPK 2023 yang memperoleh opini WTP. Secara keseluruhan, pada tahun 2023 Kementrian/Lembaga yang memperoleh opini WTP sebanyak 80 LKKL dan 1 LKBUN (95%), serta opini WDP sebanyak 4 K/L (5%). Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya penurunan opini LKKL Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022 dari WTP menjadi WDP pada 2 K/L, yaitu Kementerian Pertanian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika memperoleh opini yang sama dari tahun sebelumnya yaitu WDP dan Badan Pangan Nasional merupakan Badan yang baru memperoleh Bagian Anggaran di Tahun 2023 juga memperoleh opini WDP (jambi.bpk.go.id)

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengumumkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2013 menyatakan bahwa di Provinsi Jambi hasil dari 8 dari 11 pemerintahan daerah di Provinsi Jambi mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), hanya 3 pemerintah daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Batanghari (jambi.bpk.go.id).

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pemerintahan Kota Jambi pada periode tahun 2008 sampai tahun 2013 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) hal ini

dapat mengindikasikan tidak adanya perubahan dalam pengelolaan keuangan Kota Jambi. Pemerintahan Kota Jambi selalu terganjal dengan masalah aset dari tahun ke tahun. Keempat temuan BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2013 total nominal aset yang tidak jelas laporannya mencapai 220,64 miliar. Selain itu juga implikasi sistem pengendalian intern pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Pilkada Kota Jambi belum memadai. Temuan BPK tersebut mengakibatkan laporan keuangan pemerintah kota Jambi pada penggunaan anggaran di tahun 2013 memperoleh predikat WDP dari BPK (jambi.tribunnews.com).

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK terhadap pemerintahan Kota Jambi masih menunjukkan adanya temuan-temuan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian penerapan standar akuntansi pemerintahan, seperti kesalahan klasifikasi akun, kesalahan dalam pencatatan dan ketidaksesuaian dalam penyajian aset tetap. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun opini WTP berhasil diraih dalam beberapa tahun terakhir, tantangan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan masih perlu mendapatkan perhatian serius (jambi.bpk.go.id).

Terkait dengan penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan SAP, maka perlu diperhatikan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah seperti pemahaman akan SAP. Menurut Tuasikal (2017) untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disesuaikan oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah sistem akuntansi. Pemahaman sap ini diperlukan agar hasil laporan keuangan daerah lebih berkualitas (relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat diperbandingkan). Kegagalan penangkapan serta pelaksanaan oleh sumber daya manusia dapat mempengaruhi laporan keuangan, sebagai contoh terdapat kesalahan pada laporan keuangan yang belum memenuhi standar akuntansi pemerintah, maka laporan yang dihasilkan itu tidak berkualitas. Perbedaan interpretasi juga masih ditemukan dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan pada setiap OPD, serta lemahnya pengawasan terhadap kepatuhan

penerapan SAP yang berdampak pada penyajian informasi keuangan yang kurang relevan dan andal (Suparman & Mulyani, 2018).

Penelitian yang dilakukan Zetra (2017) menyatakan bahwa masih sulit bagi aparaturnya di daerah untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel, tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya staf yang memiliki keahlian dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran, khususnya keahlian di bidang akuntansi. Nazier (2016) juga memberikan temuan empiris yang menyatakan bahwa 76,77% unit pengelola keuangan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diisi oleh pegawai yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sebagai pengetahuan dasar yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan. Hal ini disebabkan oleh: 1) belum ada kebijakan rekrutmen pegawai berlatar belakang akuntansi; 2) walaupun sumber daya manusia tersebut bukan berlatar belakang pendidikan akuntansi, akan tetapi mereka dianggap mampu menjalankan/melaksanakan tugas dengan modal diklat dan bimbingan.

Kompetensi sumber daya manusia (*Human resources competency*) pada dewasa ini memang tenaga keuangan yang berlatar belakang pendidikan akuntansi masih kurang, sehingga belum dapat menerapkan pengelolaan keuangan daerah dengan baik. Pada Kota Jambi ditemukan hal serupa yang menjadi masalah dalam peningkatan kualitas laporan keuangan di mana masih kurang staf keuangan yang berlatar belakang pendidikan akuntansi namun banyaknya pegawai yang masih awam terhadap teknologi atau akuntansi yang berbasis komputer sehingga menghambat pencapaian tujuan dari pemanfaatan sistem informasi akuntansi tersebut. Di samping itu, ada indikasi rendahnya kinerja OPD yang dikarenakan rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam mengimplementasikan pengelolaan keuangan daerah. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintahan masih belum memadai. Apabila sumber daya manusia yang ada di organisasi pemerintahan masih minim yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, maka ini akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang akan dibuat.

Pengalaman kerja (*Work Experience*) menjadi penyebab lain yang bisa mempengaruhi kemampuan pengaturan keuangan daerah, seseorang yang tidak atau kurang berpengalaman dalam penyusunan dan pembuatan laporan keuangan. Meskipun pemerintahan Kota Jambi telah berupaya meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta memperkuat kompetensi sumber daya manusia, namun kualitas laporan keuangan yang dihasilkan belum sepenuhnya optimal. Salah satu faktor penting yang menjadi perhatian adalah pengalaman kerja aparatur di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Kota Jambi, masih ditemukan berbagai kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan yaitu ketidaksesuaian pencatatan dengan standar akuntansi, keterlambatan penyusunan laporan keuangan, kesalahan klasifikasi akun. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai dengan pengalaman terbatas cenderung kesulitan dalam mengimplementasikan standar akuntansi pemerintah secara konsisten dan akurat. Sehingga pengalaman kerja mempengaruhi kemampuan individual dalam mengelola transaksi keuangan dan memahami peraturan akuntansi yang menjadikan kurangnya pengalaman dapat menyebabkan kesalahan pencatatan dan pelaporan (Arifin, 2021). Begitu pula dengan pengalaman kerja semakin lama seseorang bekerja maka akan semakin banyak pengalaman yang dimiliki sehingga seseorang yang telah lama bekerja akan semakin minim kesalahan yang dilakukan selama proses bekerja.

Beberapa penelitian yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah adalah standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia, dan pengalaman kerja. Vidyantari *et al.*, (2024) menjelaskan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, maka penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang baik akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. Hasil ini sejalan dengan Hale *et al.*, (2024) yang menyatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, karena penerapan Standar Akuntansi Pemerintah sangat penting untuk dilakukan guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Aprsiansyah *et al.*, (2020) mengemukakan hasil yang berbeda bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan, maka penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang belum tentu dapat meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan.

Zubaidi (2019) menjelaskan bahwa Kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan hubungan yang positif. Ini membuktikan bahwa Kompetensi SDM yang baik akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Gita dan Budiasih (2019) dan Ariyanto (2020) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Pemerintah yang memiliki kompetensi dalam menyajikan laporan keuangan akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Puspita (2023) menyatakan hasil yang berbeda bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sama halnya dengan Hendrawan (2018) dan Ramadhan (2023) dalam penelitian yang menjelaskan penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Mengenai variabel pengalaman kerja menurut Maulid *et al* (2022) dan Aisyah (2024) menyatakan bahwa terdapat pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas laporan keuangan. Pengalaman kerja dapat meningkatkan etos kerja, semakin baik pengalaman seseorang maka akan semakin baik etos kerja yang dimiliki dan akhirnya akan mempunyai kinerja yang baik pula. Hasil ini sejalan dengan Swandika *et al* (2023) yang menyatakan bahwa pengalaman kerja memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dikarenakan apabila individu yang memiliki jangka waktu kerja yang lama dalam satu bidang tertentu maka akan menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Berbagai penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan masih mendapatkan hasil yang tidak konsisten, sehingga diperlukan upaya yaitu penerapan standar akuntansi pemerintahan,

meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan pengalaman kerja dari seorang karyawan. Kompetensi sumber daya manusia yang dirasakan di bawah harapan maka kualitas laporan keuangan tidak sesuai dengan standar pemerintahan yang ditetapkan sedangkan jika kompetensi sumber daya manusia yang dirasakan sesuai dengan harapan atau bahkan melebihi harapan maka kualitas laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan.

Penelitian ini juga merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya oleh Kuntadi dkk (2022) yang meneliti tentang pengaruh standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Namun, terdapat juga perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu pada variabel X_3 mengenai pengalaman kerja. Pada penelitian sebelumnya tidak menjelaskan variabel pengalaman kerja. Oleh karena itu peneliti memilih variabel tersebut. Alasannya karena dengan pengalaman seseorang menjadi pakar untuk melakukan profesi dan terus menjadi sempurna dalam berpikir dan aksi dalam berperan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lamanya seseorang melakukan pekerjaan dibidang tertentu maka kemahiran yang diperoleh juga akan semakin baik sehingga dapat memberikan hasil yang memuaskan pada pekerjaannya.

Berdasarkan temuan peneliti sebelumnya yang masih terdapat perbedaan hasil penelitian maka peneliti mencoba melakukan pengujian kembali terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul " **Pengaruh *Implementation of Government Accounting Standard, Human Resources Competency and Work Experience* terhadap *Quality of Financial Reports* pada Pemerintahan Kota Jambi.**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh *implementation of government accounting standard* terhadap *quality of financial reports* pada pemerintahan Kota Jambi?
2. Apakah terdapat pengaruh *human resources competency* terhadap *quality of financial reports* pada pemerintahan Kota Jambi?
3. Apakah terdapat pengaruh *work experience* terhadap *quality of financial reports* pada pemerintahan Kota Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *implementation of government accounting standard* terhadap *quality of financial reports* pada pemerintahan Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *human resources competency* terhadap *quality of financial reports* pada pemerintahan Kota Jambi.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *work experience* terhadap *quality of financial reports* pada pemerintahan Kota Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Sejumlah tujuan penelitian yang dijelaskan di atas, peneliti berharap dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini, diharapkan dapat digunakan menjadi referensi atau rekomendasi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang sangat terkait pada bidang Akuntansi Sektor Publik (ASP) khususnya pada instansi pemerintah yang menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah kota jambi, pegawai atau karyawan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk mengetahui arti

penting standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia dan pengalaman kerja sehingga dapat mendorong kualitas laporan keuangan pemerintahan di kota jambi.